

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KALIMANTAN BARAT 2019-2024

Oktaviani Putri¹; Nella Yantiana²; Gita Desyana³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura (UNTAN)

Pontianak^{1,2,3}

Email : b1031221088@studentuntan.ac.id¹; nella.yantiana@ekonomi.untan.ac.id²;
gita.desyana@ekonomi.untan.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat periode 2019–2024. Kinerja keuangan diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan. Penelitian ini dilandasi kebutuhan optimalisasi pengelolaan fiskal daerah dalam konteks otonomi yang bertanggung jawab. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan analisis regresi linier berganda melalui SPSS versi 26, menggunakan data dari laporan realisasi APBD. Hasil menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan, Pendapatan Transfer berpengaruh negatif namun signifikan, dan Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi PAD dan pengelolaan transfer pusat secara efisien guna meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; Belanja Modal; Kinerja Keuangan Daerah

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of Local Revenue, Central Government Transfer Revenue, and Capital Expenditure on Local Financial Performance in 14 districts/cities in West Kalimantan during the period 2019–2024. Financial performance is measured using the financial independence ratio. This study is based on the need to optimize local fiscal management in the context of responsible autonomy. A quantitative approach was employed using multiple linear regression analysis via SPSS version 26, utilizing data from the implementation reports of the Regional Budget (APBD). The results indicate that Local Government Revenue has a positive and significant impact, Central Government Transfer Revenue has a negative but significant impact, and Capital Expenditure has a positive but insignificant impact. Simultaneously, all three variables have a significant impact on financial performance. This study recommends optimizing PAD and efficiently managing central transfers to improve regional financial performance.

Keywords : Regional Original Revenue; Transfers from the Central Gover; Capital Expenditures; Financial Performance of Local Governments

PENDAHULUAN

Setelah reformasi 1998, Indonesia memberlakukan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya perubahan pemerintahan, dengan maksud agar pemerintah pusat tidak terlalu mengambil kontribusi sehingga daerah memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengatur urusan masyarakatnya sendiri (Nkomah et al., 2016; Wahyudin & Hastuti, 2020). Otonomi daerah dijalankan dengan berpegang pada landasan hukum sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang setiap regulasi tersebut mengatur aspek-aspek krusial dalam pelaksanaan pemerintahan daerah serta mekanisme perimbangan fiskal antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Wujud praktis dari kebijakan tersebut tampak dalam penerapan desentralisasi fiskal, yang membuka kesempatan untuk pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri dan otonom. Dalam sektor ini, pemerintah daerah berperan aktif dalam memaksimalkan kapasitas fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), merancang prioritas belanja modal, serta mengelola distribusi dana transfer dari pemerintah pusat. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mendorong pengelolaan sumber daya daerah yang lebih efisien, mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah, serta meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat (Padang & Padang, 2023).

Kemampuan sebuah daerah untuk menopang kegiatan pemerintahannya secara otonom kerap tercermin melalui besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil dihimpun. PAD bersumber dari beragam penerimaan, meliputi pendapatan dari pajak daerah, pungutan retribusi, laba atas pengelolaan badan usaha milik daerah, serta berbagai sumber pendapatan lain yang diperbolehkan secara legal. Ketika terjadi peningkatan dalam PAD, hal ini menjadi indikasi bahwa daerah tersebut mulai mengurangi ketergantungannya terhadap aliran dana dari pemerintah pusat, mencerminkan kemandirian fiskal yang semakin kokoh (Yahya, 2022).

Hasil dari sejumlah penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa PAD memainkan peran yang konstruktif serta berdampak kuat terhadap perwujudan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. PAD dianggap menjadi salah satu faktor utama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Di sisi lain, pengeluaran untuk belanja modal turut memainkan peran dalam mendukung pembangunan wilayah. Anggaran ini umumnya dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana jangka panjang seperti jalan raya,

jembatan, maupun fasilitas layanan umum. Apabila pengelolaannya efektif, belanja modal dapat memperbaiki layanan publik, menggerakkan laju ekonomi dan memperluas peluang kerja (Dwigantara & Handayani, 2020). Akan tetapi, temuan empiris yang didapatkan dalam penelitian oleh (Maulina et al., 2021) serta (Padang & Padang, 2023) menunjukkan bahwa keterkaitan antara Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah tidak senantiasa memberikan hasil yang kuat secara statistik, hal ini sangat dipengaruhi oleh konteks masing-masing daerah serta tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain dua komponen tadi, transfer pendapatan dari pemerintah pusat juga sangat penting. Dana seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan kemampuan fiskal antar daerah, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk mendanai berbagai program prioritas nasional yang pelaksanaannya didelegasikan kepada pemerintah daerah. Transfer dari pusat berfungsi untuk menjaga keseimbangan antarwilayah dan terbukti dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah (Mawardiaty & Hasbi, 2025; Rachman, 2023).

Kinerja keuangan daerah menggambarkan seberapa baik daerah dalam mengelola keuangannya demi menunjang pelayanan publik. Kinerja ini dinilai melalui berbagai aspek seperti efisiensi, efektivitas, keterbukaan informasi, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap regulasi. Prinsip tersebut merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, di mana penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah perlu berlandaskan pada tata kelola yang disiplin, hemat biaya, serta dapat dipertanggungjawabkan (Ardelia et al., 2022; Wahyudin & Hastuti, 2020).

Sejumlah penelitian terdahulu telah menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, serta Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terbukti berkontribusi dengan Kinerja Keuangan Daerah. Penelitian (Padang & Padang, 2023), serta (Wahyudin & Hastuti, 2020), mengindikasikan bahwa PAD memberikan kontribusi yang berkaitan erat terhadap kinerja keuangan, sementara pengaruh Belanja Modal cenderung lemah atau tidak konsisten. Hasil serupa juga ditemukan oleh (Prastiwi & Aji, 2020), serta (Maulina et al., 2021). (Mawardiaty & Hasbi, 2025) juga menyatakan bahwa baik PAD maupun Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat memberikan dampak yang kuat terhadap peningkatan Kinerja Keuangan Daerah.

Namun, jika diperhatikan lebih lanjut, penelitian-penelitian sebelumnya belum memberikan hasil yang konsisten. Ada yang menggabungkan PAD dengan dana perimbangan

(Padang & Padang, 2023; Prastiwi & Aji, 2020), sementara yang lain menggunakan variasi variabel seperti dana keistimewaan atau ukuran pemerintah daerah (Febriyanti, 2022; Maulina et al., 2021). Bahkan hasilnya pun tidak selalu sama, terutama dalam pengaruh belanja modal dan dana transfer. Kondisi ini mencerminkan bahwa terdapat ruang yang belum banyak dieksplorasi, khususnya terkait pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat selama rentang waktu 2019 hingga 2024, sehingga menjadi topik yang relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Lingkup penelitian ini diarahkan pada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat, yang terdiri atas 14 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Bengkayang, Landak, Kapuas Hulu, Ketapang, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sintang, Melawi, Kayong Utara, Kubu Raya, Sekadau, serta Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat sebagai fokus kajian didasari oleh pertimbangan bahwa wilayah ini masih jarang menjadi objek penelitian empiris, terutama dalam studi yang mengeksplorasi keterkaitan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Transfer dari Pemerintah Pusat dengan Kinerja Keuangan Daerah.

Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang tercantum pada Gambar 1, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkup pemerintahan Provinsi maupun pemerintahan daerah tingkat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat mengalami perlambatan atau tren menurun sepanjang tahun 2019 sampai 2024. Pada awalnya, PAD cukup tinggi yaitu sebesar 112,42% pada tahun 2019, namun menurun drastis di tahun pandemi menjadi 80,17% pada tahun 2020. Setelah itu, perlahan meningkat menjadi 87,49% pada tahun 2021 dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 120,39%. Meskipun sempat turun pada tahun 2023 dan 2024, PAD tetap berada di atas 100%, masing-masing 106,38% dan 104,76%. Hal ini menunjukkan bahwa Kalimantan Barat memiliki kemampuan yang cukup baik dalam meningkatkan pendapatan daerah pasca pandemi.

Adapun belanja modal juga menunjukkan dinamika yang cukup kentara. Pada tahun 2019, proporsinya tercatat sebesar 88,48%, kemudian menurun menjadi 60,66% pada tahun 2020, dan lebih lanjut mencapai 55,5% pada tahun 2021, seiring dengan

kondisi pandemi yang mempengaruhi alokasi anggaran. Namun, terjadi sepanjang tahun 2022 sebesar 111,97%, yang kemungkinan besar sebagai upaya pemulihan perekonomian daerah. Setelah itu, modal belanja menurun kembali menjadi 102,98% pada tahun 2023 dan 91,09% pada tahun 2024.

Sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat relatif stabil, meski sempat naik. Pada tahun 2019 sebesar 97,95%, lalu sedikit merosot di tahun 2020 menjadi 96,24%, dan meningkat menjadi 101,77% pada tahun 2021, serta 106,23% pada tahun 2022. Setelah itu, sedikit menurun kembali menjadi 102,94% pada tahun 2023 dan 96,43% pada tahun 2024. Kenaikan pada tahun 2022 kemungkinan besar karena dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi (Hidayat, 2024).

Berdasarkan data yang tersedia, perubahan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, serta pendapatan transfer dari pemerintah pusat tampak memberikan dampak terhadap mekanisme pengelolaan keuangan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Situasi ini menegaskan urgensi untuk melakukan kajian mendalam terkait pengaruh ketiga variabel terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam rentang waktu 2019 sampai 2024. Diharapkan, temuan dari studi ini akan menyajikan informasi yang bernilai guna mendukung penyusunan perencanaan serta kebijakan keuangan daerah yang lebih efisien dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan memberikan pemahaman bahwa masyarakat memberikan otoritas kepada pemerintah daerah guna mewakili dan mengelola sumber daya publik dan pemerintah bertanggung jawab mengelola keuangan daerah dan menyelenggarakan pelayanan publik demi kepentingan masyarakat luas. (Periansya et al., 2021; R. A. R. Putri & Amanah, 2020).

Masalah dapat muncul ketika informasi yang dimiliki pemerintah lebih banyak daripada yang diketahui masyarakat. Ketimpangan ini bisa menyebabkan izin, seperti korupsi atau pengelolaan anggaran yang tidak transparan (Aulia & Rahmawaty, 2020). Pada penelitian ini, teori keagenan akan digunakan sebagai teori dasar yang menganalisis bagaimana Pemerintah Daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah,

Belanja Modal, dan Pendapatan Transfer dari Pusat dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Ketika pemerintah memiliki informasi yang tidak sepenuhnya diketahui masyarakat, Teori Sinyal menyarankan agar pemerintah menyampaikan sinyal tertentu untuk menjelaskan kinerjanya. Langkah ini membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan rasa percaya publik terhadap pengelolaan keuangan dan pelayanan yang dilakukan. Dalam konteks sektor publik, pemerintah daerah memberikan sinyal melalui penyediaan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kinerja mereka secara objektif, sekaligus memperoleh dukungan dari masyarakat agar menggerakkan pemerintahan lebih efektif (Padang & Padang, 2023). Pada penelitian ini, teori sinyal dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa Kinerja Keuangan Daerah adalah bentuk komunikasi (sinyal) kepada masyarakat sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban publik.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Daerah dijadikan instrumen evaluatif untuk menilai efektivitas dan tingkat otonomi fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengelolaan anggaran. Penilaian ini umumnya dilakukan melalui berbagai rasio, seperti rasio efisiensi, efektivitas, kemandirian, keserasian belanja, serta pertumbuhan pendapatan daerah. Salah satu rasio yang penting adalah rasio kemandirian, yaitu perbandingan antara PAD dengan total pendapatan. Rasio ini berguna untuk sejauh mana daerah dapat mandiri tanpa tergantung pada dana pusat (Nugroho & Rohman, 2012).

Kinerja adalah hasil kerja yang dibandingkan dengan standar tertentu. Oleh karena itu, pengukuran kinerja penting untuk memastikan bahwa program pembangunan berjalan sesuai sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Secara keseluruhan, kinerja keuangan ini mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran guna mendukung proses pembangunan dan meningkatkan mutu layanan publik kepada masyarakat. Evaluasi kinerja ini sekaligus berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong keterbukaan informasi dan mempertanggungjawabkan capaian pemerintah di hadapan masyarakat.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagai penanda utama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merefleksikan kompetensi suatu wilayah dalam mengarahkan serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Besarnya kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah menjadi cerminan langsung atas tingkat kemandirian fiskal yang berhasil dicapai. Seiring dengan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah tersebut cenderung mengurangi ketergantungannya pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan (Padang & Padang, 2023; Prastiwi & Aji, 2020). Merujuk pada teori keagenan, interaksi antara masyarakat sebagai pemilik kepentingan dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana menuntut pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan transparan. Apabila PAD diperoleh dalam jumlah yang cukup besar dan dikelola secara efektif, maka hal ini dapat dijadikan sebagai pertanda meningkatnya mutu pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Dwigantara & Handayani, 2020; Maulina et al., 2021). Oleh karena itu, PAD tidak hanya menjadi sumber dana, tetapi juga bisa menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatur keuangan dan menjalankan pembangunan (Ardelia et al., 2022).

Beragam penelitian terdahulu telah memberikan bukti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki keterkaitan yang erat dengan pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudin & Hastuti, 2020) ditemukan bahwa peningkatan PAD berkontribusi pada perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah. Temuan serupa juga diungkapkan dalam penelitian (Ardelia et al., 2022), (Prastiwi & Aji, 2020), serta (Maulina et al., 2021), yang secara konsisten menyatakan bahwa PAD memberikan andil signifikan dalam meningkatkan efektivitas kinerja keuangan pada tingkat pemerintahan daerah.

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat.

Pengaruh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat merupakan bagian dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di berikan kepada pemerintah

daerah sebagai wujud dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Alokasi tersebut bertujuan untuk memperkuat potensi daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mengurangi ketimpangan fiskal antar wilayah guna mewujudkan pemerataan pembangunan. Dana ini masih menjadi sumber pembiayaan utama bagi banyak daerah, terutama yang belum mandiri secara fiskal (Arafah & Najamuddin, 2023).

Meskipun dana transfer sangat membantu dalam mendukung pembangunan daerah, ketergantungan yang berlebihan dapat membuat daerah menjadi kurang termotivasi untuk menggali sumber pendapatan sendiri. Padahal, kemampuan untuk menghasilkan pendapatan sendiri merupakan indikator penting dari kinerja keuangan daerah yang sehat. Meski begitu, secara umum transfer dana dari pemerintah pusat tetap memberikan pengaruh positif karena membantu memperkuat kapasitas keuangan daerah.

Penelitian (Mawardiaty & Hasbi, 2025) menyatakan bahwa bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat terbukti memberikan pengaruh yang berarti terhadap capaian pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah. Artinya, dana ini berperan dalam meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai operasional dan pembangunan. Namun, untuk mencapai kinerja yang optimal, daerah tetap perlu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengelola keuangannya secara efisien.

H2 : Transfer Pendapatan Pemerintah Pusat Berpengaruh Negatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal ialah pengeluaran pemerintah daerah untuk membangun atau membeli aset seperti jalan, gedung, dan fasilitas umum yang dapat digunakan dalam waktu lama (Maulina et al., 2021). Pengeluaran ini dianggap produktif karena bisa mendorong pembangunan dan memperbaiki layanan kepada masyarakat. Jika modal belanja digunakan dengan baik, maka hasilnya bisa meningkatkan pendapatan daerah. Infrastruktur yang bagus dapat menarik investor dan mendorong aktivitas perekonomian di daerah tersebut (Novita & Arza, 2024; Padang & Padang, 2023). Selain itu, infrastruktur yang memadai juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat, yang pada akhirnya membuat kondisi keuangan daerah menjadi lebih baik.

Jadi, semakin efektif penggunaan belanja modal, maka kemungkinan tercapainya kinerja keuangan yang lebih baik di tingkat daerah akan meningkat.

Meskipun demikian, berbagai studi menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh dan kontribusi belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian (Wahyudin & Hastuti, 2020) serta (Maulina et al., 2021) mengindikasikan adanya pengaruh positif dari belanja modal, walaupun tidak mencapai tingkat kekuatan statistik yang memadai. Sementara itu, (Simamora & Budiwitjaksono, 2022) menunjukkan bahwa belanja modal berkontribusi terhadap ukuran kinerja keuangan. Sebaliknya, (Fernandes & Putri, 2022) menunjukkan bahwa modal belanja tidak memberikan pengaruh berarti. Penelitian (Maharani et al., 2025) justru menemukan adanya pengaruh yang cukup dominan secara statistik bersumber dari belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah. Perbedaan temuan tersebut mencerminkan ketidakpastian yang masih melingkupi keterkaitan antara belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk memperjelas fenomena ini.

H3 : Belanja Modal Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan berbasis data kuantitatif, yang secara metodologis mengandalkan analisis statistik deskriptif guna mengevaluasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat, dan belanja modal terhadap performa keuangan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu 2019 hingga 2024. Tujuan dari pengkajian ini ialah untuk mengidentifikasi sejauh mana ketiga variabel tersebut memberi kontribusi secara terpisah maupun bersamaan terhadap dinamika kinerja fiskal daerah. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh melalui realisasi anggaran daerah yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui situs resminya (www.djpk.kemenkeu.go.id), yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan basis data penelitian.

Penelitian ini mengambil seluruh wilayah administratif tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagai ruang lingkup analisis, yang berjumlah 14 daerah. Tidak diterapkannya teknik pemilihan sampel secara acak dikarenakan pendekatan yang diambil berupa sensus; dengan kata lain, tidak ada unit populasi yang dikeluarkan dari proses pengamatan. Rentang temporal observasi ditetapkan selama enam tahun, dimulai dari 2019 hingga 2024, yang kemudian menghasilkan total sebanyak 84 titik data hasil perkalian jumlah daerah dengan cakupan tahun. Informasi yang menjadi dasar analisis diperoleh melalui metode dokumentasi, dengan fokus pada laporan realisasi anggaran yang tersedia dalam domain publik secara digital. Untuk proses pengolahan data, digunakan perangkat lunak SPSS versi 26, yang melibatkan serangkaian prosedur analisis seperti penyajian statistik deskriptif, evaluasi terhadap asumsi dasar regresi, penerapan regresi linier berganda, serta pengujian parameter model melalui uji individual (t-test) dan uji simultan (F-test), dilengkapi dengan penilaian kekuatan model melalui Adjusted Coefficient of Determination (Adjusted R²). Pengukuran kinerja fiskal dilakukan dengan mengadopsi rasio tingkat kemandirian, yang diperoleh dari perbandingan Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah pendapatan transfer yang disalurkan oleh pemerintah pusat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Sebagai langkah awal, pendekatan statistik deskriptif dimanfaatkan untuk menguraikan karakteristik dari beberapa variabel penelitian, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, dan Belanja Modal, dalam konteks pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Cakupan data yang dianalisis mencakup 14 kabupaten/kota selama rentang waktu 2019 hingga 2024.

Merujuk pada Tabel 1, analisis data mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencatatkan angka 104,9995 untuk merepresentasikan rata-rata, sedangkan variabilitas datanya tercermin melalui standar deviasi 57,54950, artinya kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri relatif rendah dan bervariasi antar Kabupaten/Kota. Sementara itu, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat memiliki nilai *mean* 1145,0303 dengan standar deviasi 346,24188 yang menunjukkan bahwa mayoritas sumber pendapatan daerah berasal dari transfer pemerintah pusat.

Tingginya standar deviasi menunjukkan perbedaan besar dalam alokasi transfer antar daerah. Sementara itu, Belanja Modal memiliki nilai *mean* 207,1744 dengan standar deviasi 64,37191 yang berarti alokasi belanja modal cukup besar namun tidak merata. Variabel dependen, yakni Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, tercatat memiliki nilai rata-rata senilai 8,4629 serta nilai standar deviasi 3,53524, yang mengindikasikan adanya disparitas kinerja keuangan antar daerah.

Uji Normalitas Kolmogorov

Pengujian Normalitas dilakukan dengan harapan dapat memverifikasi apakah sisa-sisa (residu) dalam model regresi mengikuti pola distribusi yang normal. Merujuk pada Tabel 2, hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov mengindikasikan tingkat probabilitas yang diperoleh mencapai 0,200, melebihi ambang batas 0,05, yang mengimplikasikan bahwa sisa prediksi model tersebar dengan pola distribusi normal.

Merujuk pada Gambar 2. dan 3, grafik histogram menunjukkan bentuk yang mirip seperti lonceng dan seimbang di kedua sisi, yang menandakan data berfungsi secara normal. Selanjutnya, pada grafik P-P Plot, observasi titik-titik data tampak berbaris sejajar, menandakan bahwa distribusi data cenderung normal. Kedua visualisasi ini memperkuat temuan uji statistik yang menyatakan bahwa residual dalam model regresi telah memenuhi prasyarat normalitas.

Uji Multikolineritas

Uji Multikolineritas dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya keterkaitan yang kuat antara variabel-variabel bebas dalam model penelitian. Mengacu pada Tabel 3, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai toleransi untuk variabel 1, variabel 2, dan variabel 3 berada di atas 0,10, sementara nilai VIF tercatat di bawah angka 10. Temuan ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari permasalahan multikolineritas.

Uji Heteroskedastisitas

Merujuk pada Gambar 4 dalam Grafik Scatterplot, distribusi titik-titik data terlihat acak tanpa pola yang khas seperti penyempitan atau pelebaran. Artinya, data tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Dengan kata lain, variabel kesalahan (residual) memiliki sebaran yang stabil atau sama di setiap nilai prediksi. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa model regresi telah memenuhi kriteria asumsi fundamental, sehingga validitas hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan.

Uji Heteroskedastisitas – Glejser

Merujuk pada Tabel 4, didapati nilai uji yang diperoleh untuk variabel X1 (0,878), X2 (0,777), dan X3 (0,306) seluruhnya berada di atas nilai batas pengujian 0,05. Hal tersebut mencerminkan bahwa model yang digunakan tidak menunjukkan gejala penyebaran residu yang tidak seragam.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dalam studi ini bertujuan untuk mendeteksi adanya keterkaitan antara error residual dalam model regresi linier. Jenis metode yang diimplementasikan dalam penelitian ini yaitu metode uji Durbin-Watson, yang di mana hasil pada Tabel 5 menunjukkan nilai sebesar 1,726. Angka ini terletak di antara batas bawah ($du = 1,6875$) dan batas atas ($4 - du = 2,3125$). Dengan posisi nilai tersebut, menghasilkan model regresi bebas dan aman dari hal tidak wajar autokorelasi.

Analisis Linier Berganda

Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer dari Pemerintah Pusat, serta Belanja Modal ketika membentuk dinamika Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil pengolahan regresi menghasilkan persamaan berikut:

$$Y = 7,553 + 0,082X_1 - 0,008X_2 + 0,006X_3$$

Artinya, tiap komponen independen dalam model ini memberikan dampak yang beragam terhadap capaian kinerja keuangan daerah.

Keterangan:

- Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X2 = Transfer Pendapatan Pemerintah Pusat
- X3 = Belanja Modal

Mengacu pada Tabel 6, berikut interpretasi dari koefisien model:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (koefisien 0,082) memperlihatkan pengaruh yang mengarah pada peningkatan kinerja keuangan daerah. Dengan makna lain, semakin besar PAD yang dihimpun, semakin meningkat pula kapabilitas keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (koefisien -0,008) justru berkorelasi negatif dengan kinerja keuangan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa semakin besar porsi

pendapatan transfer yang diterima, kecenderungannya justru kinerja keuangan daerah melemah, kemungkinan akibat tingginya ketergantungan fiskal terhadap pusat.

- 3) Belanja Modal (koefisien 0,006) menunjukkan kecenderungan pengaruh yang mengarah positif, namun secara statistik belum mencapai signifikansi. Ini menandakan bahwa meskipun penguatan Belanja Modal diharapkan mendorong perbaikan kinerja keuangan, bukti empiris dalam konteks ini belum cukup kuat untuk menyimpulkan adanya pengaruh yang konsisten.

Dengan koefisien sebesar 0,082, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti berperan menjadi faktor yang memperkuat kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengandung makna bahwa seiring dengan meningkatnya PAD, kemampuan keuangan daerah pun mengalami perbaikan. Semakin besar potensi PAD yang berhasil dimobilisasi, semakin kuat pula fondasi keuangan daerah yang terbentuk. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat justru menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan, dengan nilai koefisien -0,008. Artinya, jika pendapatan transfer dari pusat bertambah, maka kinerja keuangan daerah cenderung menurun. Belanja Modal menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan, dengan koefisien 0,006. Artinya, peningkatan modal belanja sebenarnya bisa membantu meningkatkan kinerja keuangan, tetapi berdasarkan data yang ada, pengaruhnya belum cukup kuat atau konsisten. Kesimpulannya, PAD merupakan faktor utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kinerja keuangan daerah, sementara belanja modal belum menunjukkan pengaruh yang kuat secara statistik.

Uji t

Pengujian menggunakan uji t dilakukan untuk mengukur kontribusi tersendiri dari setiap variabel bebas (X) secara terpisah terhadap variabel terikat (Y), yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan data pada Tabel 6, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kontribusi yang memperkuat kinerja fiskal daerah, di mana tercermin bahwa dari nilai t sebesar 26,538 serta tingkat probabilitas 0,000 yang jauh melampaui batas konvensional 0,05. Temuan ini mengisyaratkan bahwa peningkatan PAD berjalan selaras dengan kecenderungan perbaikan dalam performa keuangan pemerintah daerah.

Sebaliknya, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat menunjukkan pola pengaruh yang berlawanan arah dan hal ini didukung oleh hasil uji statistik, terlihat dari nilai t

sebesar -10,759 dengan probabilitas 0,000 (kurang dari 0,05). Temuan ini memberikan isyarat bahwa peningkatan besaran dana transfer justru berpotensi melemahkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Di sisi lain, Belanja Modal menunjukkan arah pengaruh yang mendukung, meskipun secara statistik belum cukup kuat untuk dikatakan berarti, dengan capaian nilai t sebesar 1,930 serta signifikansi 0,059 ($> 0,05$). Dengan demikian, peningkatan dalam Belanja Modal masih belum mampu menghasilkan perubahan yang terukur terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Uji F

Uji F digunakan agar dapat menilai besaran pengaruh gabungan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan data pada Tabel 7, didapatkan nilai F sebesar 266,970 dengan tingkat probabilitas 0,000, yang secara jelas masih berada di bawah tingkat toleransi 0,05. Hasil ini menegaskan bahwa ketiga variabel tersebut secara kolektif memiliki peran yang kuat dalam menjelaskan variasi kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu, perubahan dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dipahami sebagai hasil kontribusi terpadu dari PAD, transfer dana pusat, dan belanja modal.

Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Mengacu pada Tabel 8, nilai *Adjusted R Square* tercatat sebesar 0,932, yang artinya sekitar 93,2% variasi yang terjadi pada kinerja keuangan pemerintah daerah dapat ditelusuri melalui kontribusi gabungan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pemerintah Pusat, serta Belanja Modal. Ketiga variabel ini secara bersama-sama memainkan peran substansial dalam menjelaskan dinamika kinerja keuangan tersebut. Sebaliknya, terdapat sekitar 6,8% variasi dalam kinerja keuangan yang dipengaruhi oleh aspek-aspek eksternal yang tidak terakomodasi dalam kerangka variabel penelitian ini. Selain itu, nilai R sebesar 0,967 mengisyaratkan tingkat keterkaitan yang sangat erat di antara seluruh variabel yang membentuk model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil analisis regresi dan pengujian statistik t mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kontribusi yang bersifat membangun dalam meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Bukti empiris memperlihatkan koefisien sebesar 0,082 dengan nilai probabilitas 0,000, yang masih berada di bawah ambang batas 0,05. Temuan ini menandakan bahwa semakin efisien pengelolaan PAD, semakin jelas pula pola peningkatan kinerja keuangan daerah. Sehingga, hipotesis pertama (H1) dapat diterima dan sejalan dengan rumusan awal yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini mendukung teori agensi, yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai "agen" harus bisa mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan dengan baik demi kepentingan masyarakat sebagai "prinsipal" atau pihak yang menyembunyikan. PAD yang tinggi mengindikasikan bahwa daerah tersebut mampu mengelola dan mengembangkan potensi lokal secara optimal. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat dan mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih mandiri serta efisien.

Temuan ini mendapat dukungan dari studi terdahulu yang dilakukan oleh (Wahyudin & Hastuti, 2020), (Ardelia et al., 2022), (Prastiwi & Aji, 2020), dan (Maulina et al., 2021). Penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa PAD memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa PAD tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan daerah semata, tetapi juga menjadi cerminan potensi pemerintah daerah dalam mengelola dana dengan efektif dan bertanggung jawab.

Pengaruh Transfer Pendapatan Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengolahan data regresi menunjukkan bahwa Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berkontribusi dalam menurunkan performa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini tercermin dari nilai koefisien yang berada di bawah nol, yaitu -0,055, dengan tingkat signifikansi 0,019, yang masih berada di bawah batas signifikansi 0,05. Dengan kata lain, kenaikan dana transfer dari pemerintah pusat cenderung berbanding terbalik dengan performa keuangan daerah. Salah satu kemungkinan yang melatarbelakangi kondisi ini adalah meningkatnya ketergantungan

fiskal daerah terhadap dana eksternal, sehingga mengurangi dorongan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan lokal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Konsekuensinya, tingkat kemandirian fiskal melemah, disertai penurunan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik.

Sejalan dengan hasil analisis yang menunjukkan hubungan negatif yang bermakna secara statistik, maka hipotesis kedua (H2) dinyatakan diterima. Temuan ini mendapat dukungan dari studi (Mawardiaty & Hasbi, 2025), yang mengungkapkan bahwa ketergantungan berlebihan pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat berpotensi menurunkan performa keuangan daerah, khususnya terkait dengan aspek efisiensi dan otonomi fiskal.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil analisis regresi dan uji t mengindikasikan bahwa pengeluaran pada pos belanja modal berpotensi mengarah pada penguatan performa fiskal pemerintah daerah, walaupun pengaruhnya belum memenuhi standar signifikansi statistik. Hal ini tergambar dari koefisien sebesar 0,018 dan nilai p sebesar 0,369, yang melampaui batas kritis 0,05. Dengan demikian, secara statistik, pengaruh belanja modal terhadap performa kinerja keuangan daerah belum dapat dianggap berdampak secara nyata.

Meskipun pengaruhnya positif, karena tidak signifikan, maka hipotesis ketiga (H3) ditolak. Artinya, peningkatan modal belanja belum tentu akan langsung meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah jika tidak dikelola secara efisien dan tepat sasaran. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah belanja saja tidak cukup. Apabila modal belanja tidak direncanakan dengan baik atau tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan pendapatan daerah, maka dampaknya terhadap kinerja keuangan akan rendah. Temuan dalam penelitian ini turut mendukung hasil yang diperoleh oleh (Wahyudin & Hastuti, 2020), serta (Maulina et al., 2021), yang sama-sama menyimpulkan belanja modal itu tidak senantiasa berkontribusi secara bermakna terhadap peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data yang melibatkan 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat pada periode 2019 sampai 2024, analisis regresi yang digunakan telah memenuhi seluruh asumsi klasik, seperti normalitas, tidak adanya multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi. Hal tersebut berarti membuktikan bahwa metode

yang digunakan valid untuk dijelaskan lebih lanjut. Analisis yang dilakukan secara simultan memperlihatkan bahwa keberadaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, serta Belanja Modal secara terpadu berperan dalam memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara signifikan. Artinya, ketika ketiga variabel ini dipandang sebagai satu kesatuan, mereka mampu memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan pergeseran maupun fluktuasi yang terjadi pada performa keuangan pemerintah daerah.

Secara parsial, PAD terbukti memberikan kontribusi positif yang signifikan, yang menunjukkan setiap kenaikan dalam variabel ini tampaknya turut mengontribusikan pada penguatan indikator performa keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, dana transfer dari pemerintah pusat menunjukkan pengaruh negatif yang berarti, mengisyaratkan bahwa ketergantungan berlebihan pada sumber dana ini justru dapat melemahkan kinerja keuangan daerah dengan menurunkan tingkat kemandirian fiskalnya. Sementara itu, modal belanja menunjukkan pengaruh yang positif, namun tidak signifikan, sehingga belum memberikan dampak yang cukup kuat secara statistik terhadap peningkatan kinerja keuangan. Secara keseluruhan, model regresi yang digunakan dinilai sangat baik karena mampu menjelaskan sebagian besar variasi kinerja keuangan berdasarkan ketiga variabel tersebut.

Hasil penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan efektivitas tata kelola upaya penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dengan memanfaatkan mekanisme pengembangan juga optimalisasi potensi ekonomi lokal. Selain itu, upaya untuk menekan porsi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat menjadi aspek krusial dalam membangun kemandirian fiskal daerah. Pengelolaan PAD secara tepat dan efisien diyakini mampu memberikan kontribusi positif yang memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan kinerja keuangan daerah. Meskipun modal belanja belum menunjukkan pengaruh yang signifikan, pemerintah daerah perlu merencanakan dan mengelola modal belanja secara tepat sasaran dan efisien agar dapat memberikan dampak nyata bagi kinerja keuangan serta kesejahteraan masyarakat.

Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar jangkauan objek dan periode penelitian diperbesar. Selain itu, penambahan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan daerah, seperti efisiensi pengelolaan anggaran, tingkat

transparansi, serta kualitas sumber daya manusia, dapat memperkaya hasil penelitian. Pendekatan metodologi campuran yang mengintegrasikan teknik kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan diharapkan mampu menghadirkan gambaran yang lebih detail dan menyeluruh tentang berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

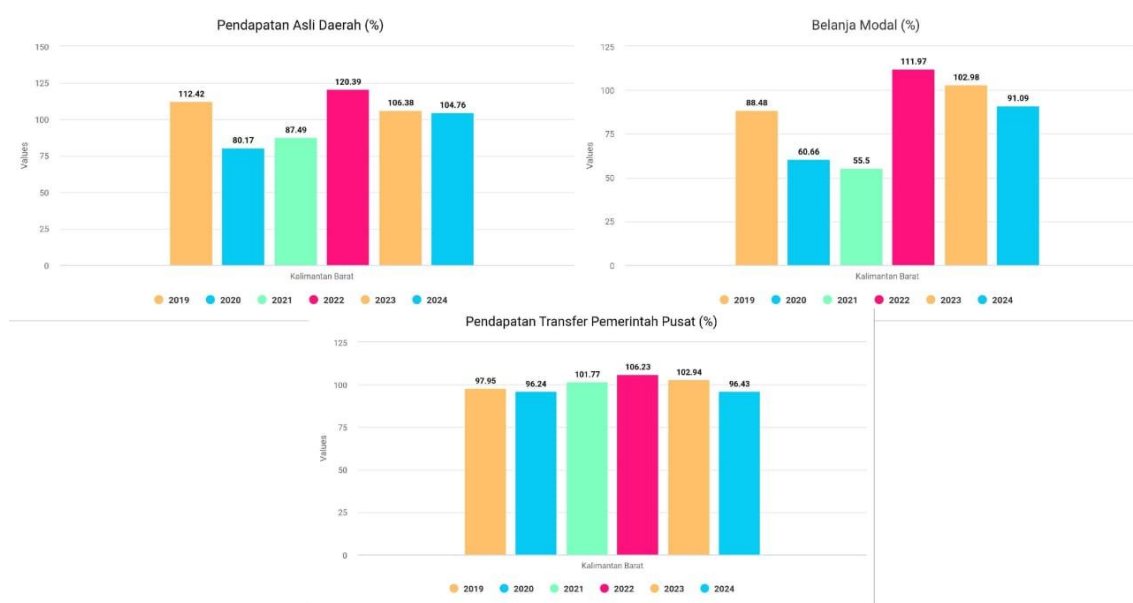
DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, R., & Najamuddin, H. K. (2023). Analysis Of Local Original Income Management And Local Transfer Budgets In Measuring Financial Performance. In *Journal AK-99* (Vol. 3, Issue 2).
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH STUDI EMPIRIS KABUPATEN DAN KOTA SE-EKS KARESIDENAN PEKALONGAN PERIODE 2016-2020. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 60–80. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165>
- Aulia, R., & Rahmawaty, R. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584–598. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16826>
- Diktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). Laporan Realisasi Anggaran. Diakses pada 14 Mei 2025 dari www.djpk.kemenkeu.go.id
- Dwigantara, M. P., & Handayani, N. (2020). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(10), 1–22.
- Febriyanti, E. M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Mirai Management*, 7, 629–637.
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA 19 KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017-2020. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3, 198–209.
- Hidayat, T. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(01), 105–115. <https://doi.org/10.37366/akubis.v9i01.1818>
- Maharani, N., Maria, & Armaini, R. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerahdi Sumatera dan Jawa Tahun 2018-2022. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 576–589.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Mawardiaty, I., & Hasbi, K. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan

- Transfer, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal EMT KITA*, 9(2), 685–693. <https://doi.org/10.35870/emt.v9i2.3985>
- Nkomah, B. B., Igbokwe-Ibeto, C. J., & Anazodo, R. O. (2016). Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil. *Oman Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 5(10), 38–54. <https://doi.org/10.12816/0028092>
- Novita, R., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2021. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 6(1), 430–443. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1367>
- Nugroho, F., & Rohman, A. (2012). PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 47–59. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/38>
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(2). www.djpk.depkeu.go.id
- Periansya, P., Dewata, E., Sari, Y., & Nuvanti, F. (2021). The Effect of Locally Generated Revenue as an Intervening Variable on the Financial Performance of the Regional Government of South Sumatra Province. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 7(4), 80–98. <https://doi.org/10.32602/jafas.2021.034>
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DANA KEISTIMEWAAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). *Jurnal Kajian Bisnis*, 28, 89–105.
- Putri, A. S., Muchtolifah, M., & Sishadiyati, S. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 85–92. <https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.10985>
- Putri, R. A. R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–20.
- Rachman, B. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Transfer Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Modal (Sensus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019) Bobi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 11146–11156.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Simamora, W. C., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah

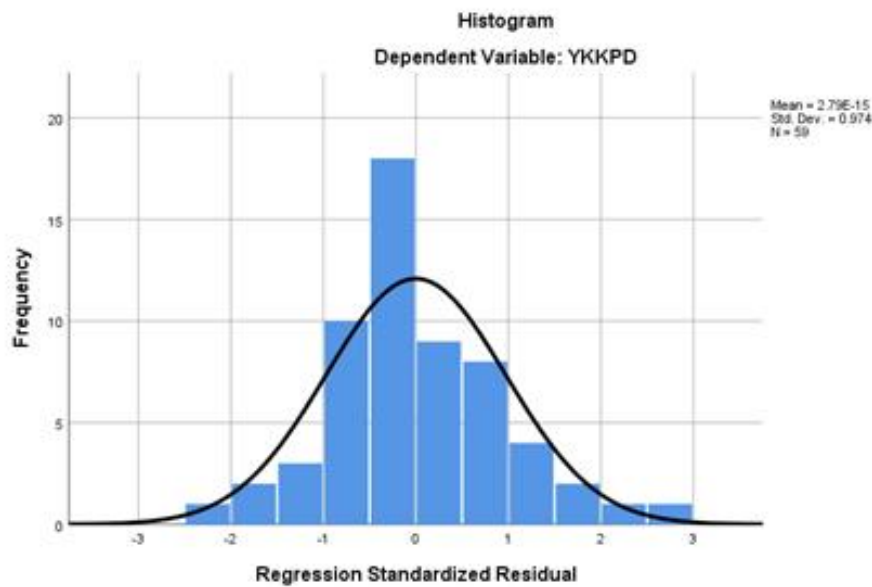
- (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 410. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.547>
- Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat The. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.
- Yahya, A. (2022). PERAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DIPENGARUHI OLEH JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BEKASI. *ACCOUNTHINK: Journal of Accounting and Finance*, 7(01), 1–13.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

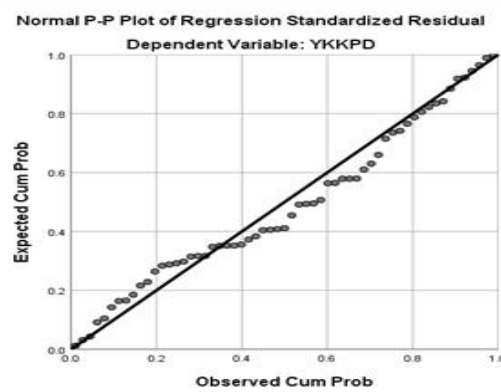


Gambar 1. Grafik Persentase PAD, Transfer Pemerintah Pusat, dan Belanja Modal Kalbar 2014-2019

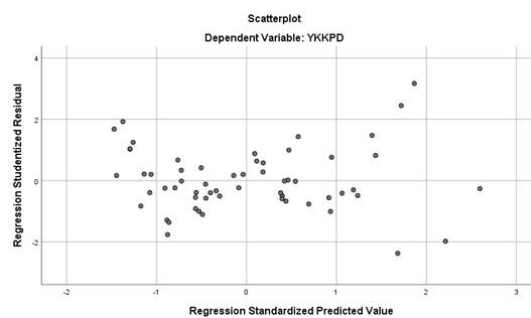
Sumber: Situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



Gambar 2. Grafik Histogram Normal
Sumber: Output SPSS versi 26



Gambar 3. Grafik P-P Plot
Sumber: Output SPSS versi 26



Gambar 4. Grafik Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Output SPSS versi 26

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1Pendapatan Asli Daerah	59	28.60	241.78	104.9995	57.54950
X2Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	59	604.06	1810.63	1145.0303	346.24188
X3Belanja Modal	59	77.24	382.36	207.1744	64.37191
Y Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	59	3.65	17.48	8.4629	3.53524
Valid N (listwise)	59				

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif
Sumber: Output SPSS versi 26 (Data diolah tahun 2025)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		59
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.86087572
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.100
	Negative	-.075
Test Statistic		.100
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Tabel 2. Uji Normalitas Kolmogorov
Sumber: Output SPSS versi 26 (Data diolah tahun 2025)

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1Pendapatan Asli Daerah	.463	2.158
	X2Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	.234	4.271
	X3Belanja Modal	.391	2.560

a. Dependent Variable: Y Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 3. Uji Multikolineritas
Sumber: Output SPSS versi 26 (Data diolah tahun 2025)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.054	.058		.933	.355
	X1Pendapatan Asli Daerah	-.001	.006	-.031	-.154	.878
	X2Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	.004	.014	.074	.284	.777
	X3Belanja Modal	-.011	.011	-.208	-1.032	.306

a. Dependent Variable: Y Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas-Glejser
Sumber: Output SPSS versi 26 (Data diolah tahun 2025)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.970 ^a	.941	.937	.88404	1.726

a. Predictors: (Constant), X3Belanja Modal, X1Pendapatan Asli Daerah, X2Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

b. Dependent Variable: Y Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 5. Uji Autokorelasi
Sumber: Output SPSS versi 26 (Data diolah tahun 2025)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.553	.440		17.161	.000
	X1Pendapatan Asli Daerah	-.008	.001	-.760	-10.759	.000
	X3Belanja Modal	.006	.003	.106	1.930	.059
	X1Pendapatan Asli Daerah	.082	.003	1.332	26.538	.000

a. Dependent Variable: Y Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 6. Analisis Linier Berganda dan Uji T
Sumber: Output SPSS versi 26 (Data diolah tahun 2025)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	678.300	3	226.100	266.970	.000 ^b
	Residual	46.580	55	.847		
	Total	724.880	58			

a. Dependent Variable: Y Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), X1Pendapatan Asli Daerah, X3Belanja Modal, X2Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Tabel 7. Uji F
Sumber: Output SPSS versi 26 (Data diolah tahun 2025)

Tabel 8. Uji Model Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.967 ^a	.936	.932	.92028

a. Predictors: (Constant), X1Pendapatan Asli Daerah , X3Belanja Modal, X2Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

b. Dependent Variable: Y Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Output SPSS versi 26 (Data diolah tahun 2025)